

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja pendamping Lokal Desa di Desa Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada :
 - a. Prestasi Kerja (*achievement*) Pendamping Lokal Desa belum memperlihatkan hasil yang positif dan pelaksanaan pendampingan belum dilaksanakan dengan baik karena jarak ,kondisi medan yang kurang memadai serta putusnya komunikasi karena keterbatasan jaringan seluler yang menghambat proses pelaksanaan tugasnya sebagai pendamping lokal desa.
 - b. Keahlian (*Skill*) dari Pendamping Lokal Desa masih rendah karena belum memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan.
 - c. Perilaku(*attitude*) terkait dengan pertanggungjawaban kerja dari Pendamping Lokal Desa tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja yang sesungguhnya karena belum terlalu fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai Pendamping Lokal Desa serta belum sepenuhnya memahami dalam penyusunan RPJMDes
 - d. Kepemimpinan (*leadership*) terkait dengan koordinasi bidang pembangunan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dengan

kepala desa belum melaksanakan dengan maksimal sehingga pendamping Lokal Desa kurang mengetahui permasalahan pembangunan yang ada di Desa Nginamanu Barat.

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada
 - a. Kualitas dan kemampuan, terkait dengan etos kerja, motivasi kerjayang dimiliki oleh Pendamping Lokal Desa masih rendah halini dipengaruhi oleh proses pelatihan. pelatihannya dilakukan satu kali sehingga pengetahuan yang diserap tidakmaksimal proses tersebut mempengaruhi kinerja PendampingLokal Desa di Desa Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada dalam percepatan pembangunan desa.
 - b. Sarana pendukung, untuk sarana kerja dari Pendamping Lokal Desa di desa Nginamanu Barat tidak tersedia. Sedangkan untuk lingkungan kerja, seperti lokasi bermasalah yang belum di sepakati dan kondisi medan kadang sangat sulit untuk di lewati oleh kendaraan karena jalan yang di lalui merupakan kaplin orang yang tidak di ijinakan untuk kendaraan yang mengangkut material.

A. Saran

1. sebaiknya pemerintah untuk segera melakukan evaluasi secara langsung mengenai kinerja dari pendamping lokal desa, pemerintah dapat memberikan *reward* kepada pendamping lokal desa yang berprestasi agar bisa lebih bermotivasi pendamping untuk melaksanakan tugas dengan maksimal. serta

memberikan *punishment* untuk pendamping yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya

2. Pendamping Lokal Desa harus mengikuti pelatihan yang berupa pelatihan fisik agar pendamping dapat menjalankan tugas dengan maksimal, pelatihan moral dan spiritual agar didapatkan pendamping yang jujur dan berkompeten, pelatihan kedisiplinan agar didapatkan pendamping yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, pelatihan kepemimpinan agar pendamping bisa mengkoordinasikan pekerjaan dengan baik. Dan pendamping lokal desa harus memiliki pengalaman kerja yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi.
3. Untuk pemerintah desa harus menyediakan sarana kerja untuk Pendamping Lokal Desa untuk memotivasi pendamping dalam melaksanakan tugasnya dalam peningkatan pembangunannya di desa.
4. Pemerintah perlu merevisi kembali persyaratan rekrutment pendamping desa mengenai kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja dari calon pendamping lokal desa dan harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan di lakukan.
5. Pemerintah perlu membentuk tim satuan kerja untuk melakukan peninjauan langsung terhadap bagaimana perilaku dan bentuk pertanggungjawaban kerja yang di lakukan oleh Pendamping Lokal Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijakan : *Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Adisasmita,Raharjo.2006.*Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*.Graha Ilmu.Yogyakarta.
- Adisasmita,Rahajo. 20013. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino,Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basri,A.F.M., dan Rivai, V. 2005. Performance appraisal. Jakarta: PT Raja. Grafindo Pesada
- Budi Winarno. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Budi winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revis*, Media Presindo. Yogyakarta. 2007.
- Burhan Bungin. 2009. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo
- Hasibuan, Melayu S.P 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung, PT. Bumi Aksa.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mustapdjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, implementasi, Evaluasi Kinerja*. LAN RI, Duta Pertiwi E. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Publik Policy : Teori Kebijakan-Analisis-Proses*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Prawirosentino, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE
- Robbins, Stephen P, 1996. *Perilaku Organisasi* Edisi ke 7 (Jilid II). Jakarta : Preballindo.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2012. *Kinerja Pegawai*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Simanjutak. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Siswanto sastrohadiwiryono. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Refika Aditama.
- Mulyani, Sry. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta Pusat : 10710
- Tangkilisan.2003. *The Policy-Making Proses*. Engleword Cliffs : Prentice Hall.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

William Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Dokumen :

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 Tentang Kementrian Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Sumber lain :

Skripsi Ilmu Pemerintahan oleh Maria Christina, tahun 2017 yang berjudul *"Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah"*

Skripsi Ilmu Administrasi Negara oleh Maqrifatulloh, Muhammad Rifki Ali Firdaus (2017) PERAN PENDAMPING DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 (study di Desa Sumberjati dan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. University of Muhammadiyah Malang

